



Implementasi Sustainable Tourism Dalam Pemulihan Citra Pariwisata Bali Pasca Isu “Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025” Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Puput Fera Ari Esta*

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: puputverraariesta@gmail.com

Abstract

This research discusses the implementation of the concept of sustainable tourism as a strategy for the Bali Provincial Tourism Office to restore Bali's tourism reputation after the emergence of the negative issue 'Bali Is Not Worth Visiting in 2025'. This issue has affected tourists' perceptions and reduced public confidence in Bali as a primary tourist destination. Additionally, the concept of Good Governance also plays a significant role in internal government management in the formation of programs that will be realized into the concept of sustainable tourism. Using a descriptive qualitative approach with interview, observation, and documentation methods, this research explains the real steps taken by the government, including strengthening local cultural identity. The Tourism Office strives to balance economic, social, and environmental interests by involving various parties, such as traditional villages, local communities, and the private sector in managing tourist sites. The results of this study indicate that the implementation of sustainable tourism not only has the potential to gradually improve Bali's tourism image but also strengthens Bali's position as a responsible, environmentally friendly, and sustainable global destination. This step also represents a form of change towards a more equitable and fair tourism management that prioritizes the long-term interests of the community and the environment in Bali.

Keywords: Sustainable Tourism, Good Governance, Bali Tourism Image, Local Culture, Destination Recovery

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi konsep sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) sebagai strategi Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk memulihkan reputasi pariwisata Bali setelah munculnya isu negatif "Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025". Isu ini sempat berpengaruh pada pandangan wisatawan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Bali sebagai tujuan wisata utama. Selain itu, konsep Good Governance juga memiliki pengaruh besar dalam tata kelola pemerintah secara internal dalam pembentukan program-program yang akan direalisasikan ke konsep sustainable tourism. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian ini menjelaskan langkah nyata yang diambil oleh pemerintah termasuk penguatan identitas budaya lokal. Dinas Pariwisata berusaha menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti desa adat, komunitas setempat, serta sektor swasta dalam pengelolaan tempat wisata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pariwisata berkelanjutan tidak hanya berpotensi memperbaiki citra pariwisata Bali secara bertahap, melainkan juga memperkuat posisi Bali sebagai destinasi global yang bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi salah satu bentuk perubahan menuju pengelolaan pariwisata yang lebih merata, adil, dan mengutamakan kepentingan jangka panjang masyarakat serta lingkungan di Bali.

Kata Kunci : Sustainable Tourism, Good Governance, Citra Pariwisata Bali, Budaya Lokal, Pemulihan Destinasi

I. Pendahuluan

Perkembangan pariwisata di Indonesia berlangsung cukup panjang dan bisa dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, serta periode setelah kemerdekaan Indonesia. Pada era kolonial Belanda, pariwisata mulai diperkenalkan secara bertahap lewat pembangunan fasilitas pendukung seperti jalur kereta api dan hotel yang diperuntukkan bagi pejabat kolonial maupun wisatawan asal Eropa. Namun, ketika Jepang menjajah Indonesia, aktivitas pariwisata menurun drastis karena fokus

utama pemerintah saat itu adalah kepentingan militer. Setelah kemerdekaan, barulah pemerintah Indonesia mulai membenahi sektor pariwisata dan menjadikannya bagian dari program pembangunan nasional. Modul Pengantar Pariwisata (2021) menyatakan bahwa “Pariwisata merupakan perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya”. Hal ini memiliki arti Pariwisata sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan berulang kali, berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain, baik dengan rencana yang matang maupun secara spontan dengan tujuan mendapatkan pengalaman yang bernilai, baik secara personal maupun sosial. Pengalaman tersebut mencakup interaksi langsung dengan lingkungan alam, budaya, serta masyarakat setempat, yang pada akhirnya dapat memperkaya pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi kita terhadap keberagaman yang ada.

Pariwisata di Bali menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan meningkatnya minat wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada awalnya, perkembangan pariwisata di Bali lebih mengutamakan pariwisata yang berlandaskan budaya. Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini terus dipertahankan sebagai strategi utama serta ciri khas pariwisata Bali. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kekayaan seni dan budaya Bali yang sangat menarik bagi para wisatawan dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk mendukung pelestarian serta pengembangan seni budaya lokal. Untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dibutuhkan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat setempat. Kerja sama ini sangat penting dalam menjaga kualitas destinasi dan dapat melestarikan budaya dan lingkungan sekitar. Interaksi antara wisatawan dengan Masyarakat maupun pengusaha sangat tercermin dalam pengertian dari kepariwisataan yang berarti seluruh kegiatan yang memiliki hubungan dengan pariwisata bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul karena kebutuhan setiap orang. Berbagai upaya seperti pengembangan infrastruktur, promosi melalui media digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing di Provinsi Bali. Namun, kemajuan pariwisata Bali juga menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tanpa pengelolaan yang tepat dapat memicu masalah, seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, dan penurunan nilai budaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata tidak hanya terfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

Pada tahun 2024, sektor pariwisata Bali dihadapkan pada tantangan serius akibat munculnya isu “Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025” pada website penyedia panduan perjalanan dari Amerika Serikat, Fodor’s travel. Isu tersebut menyebar dengan cepat melalui berbagai platform media sosial. Informasi negatif yang beredar ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan keresahan di pelaku industri pariwisata, termasuk pengelola hotel, agen perjalanan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta wisatawan domestik maupun mancanegara. Mengingat Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, informasi ini membuat daerah tersebut rentan terhadap perubahan opini publik dan persepsi global. Citra dan reputasi positif yang telah dibangun dengan berbagai upaya dapat terganggu oleh arus informasi yang belum tentu akurat. Dalam konteks ini, isu “Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025” berdampak signifikan terhadap kelangsungan sektor pariwisata, menghambat proses pemulihan pasca pandemi, dan berpotensi mengurangi kepercayaan serta minat wisatawan untuk datang. Jika situasi ini tidak ditangani dengan langkah-langkah strategis dan terarah, akan ada risiko gangguan pada stabilitas ekosistem pariwisata secara keseluruhan, mulai dari penurunan pendapatan daerah, terganggunya kesejahteraan masyarakat lokal, hingga keberlangsungan usaha di sektor pariwisata yang merupakan pilar utama ekonomi Bali. Dalam konteks ini, implementasi sustainable tourism menjadi komponen penting dari upaya untuk mengembalikan citra pariwisata Bali yang dipengaruhi oleh isu negatif.

Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan citra pariwisata Bali adalah penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Pariwisata Berkelanjutan (sustainable tourism) adalah kegiatan pariwisata yang memberikan manfaat tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan pada suatu destinasi yang memberikan dampak positif bagi

masyarakat lokal (Anjeli, Olivia. 2020). Pedoman untuk Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan disusun sebagai langkah untuk memperhatikan kebutuhan di masa depan (Widiati, Ida Ayu Putu & Permatasari, Indah. 2022) . Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tiga aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan hidup, nilai sosial-budaya, serta pertumbuhan ekonomi. Hal ini memiliki arti bahwa pembangunan destinasi wisata tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan atau keuntungan ekonomi semata, melainkan juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan, menjaga kelangsungan budaya lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Tujuan dari adanya konsep ini adalah membangun pariwisata yang bersifat berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang demi kepentingan sesaat. Namun, penerapan sustainable tourism tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa adanya Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip good governance menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem manajemen pariwisata yang bersifat transparan, melibatkan berbagai pihak, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Good governance adalah sebuah konsep yang mencakup semua tindakan dan perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari (Nurhidayat, Ipan. 2023). Hal ini memiliki arti bahwa good governance merupakan suatu konsep yang mencerminkan cara pemerintah dalam mengelola urusan publik dengan baik dan bertanggung jawab dengan menerapkan berbagai kebijakan dalam mengatasi masalah publik. Dalam sektor pariwisata, penerapan good governance memegang peranan penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global. Dinas Pariwisata Provinsi Bali, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan teknis di bidang ini memikul tanggung jawab dalam menjamin bahwa praktik tata kelola pariwisata selaras dengan prinsip good governance dari kemunculan isu “Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025” yang berisiko merusak citra dan reputasi Bali.

Adanya isu “Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025”, Dinas Pariwisata Provinsi Bali memiliki peran penting dalam menyusun strategi dalam menangani isu tersebut. Dalam konteks ini, transparansi memegang peranan penting sebagai dasar utama untuk memulihkan kepercayaan publik, baik dari masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, maupun wisatawan, terhadap sektor pariwisata yang telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Sebagai instansi yang secara langsung mengelola sektor ini, Dinas Pariwisata dituntut untuk bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan beragam informasi kepada publik. Wujud nyata dari pelaksanaan transparansi ini bisa dilakukan melalui pembangunan sarana informasi publik yang menyatu, mudah diakses, dan berisi konten yang relevan bagi semua kalangan, baik melalui media digital. Sarana ini dapat berupa situs web resmi dinas, media sosial, laporan capaian kerja tahunan, atau forum-forum dialog yang terbuka. Fasilitas informasi ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat guna menyelaraskan pemahaman serta mengurangi kemungkinan kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak tepat. Dengan tingkat transparansi yang maksimal, opini negatif yang sebelumnya berkembang di ruang publik seperti media sosial maupun portal berita dapat diluruskan melalui penyajian data, bukti nyata yang objektif.

Dengan permasalahan dan isu yang beredar, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana prinsip-prinsip good governance benar-benar dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam upaya menangani dan memperbaiki citra pariwisata Bali setelah munculnya isu “Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025”. Penelitian ini menjadi relevan karena dapat mengetahui apakah nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik telah diterapkan dalam strategi pemulihan citra tersebut. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak baik secara teori maupun praktik dalam memperkuat kembalinya reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia yang kompetitif dan berkelanjutan.

II. Metode Penelitian

Metodelogi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam strategi pemulihan citra pariwisata Bali, khususnya setelah munculnya isu mengenai “Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025”. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam, khususnya melalui sudut pandang informan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan penerapan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, peneliti berkesempatan untuk memahami konteks sosial hingga dinamika yang berlangsung di lingkungan kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka, di mana pengumpul data melakukan tanya jawab dengan narasumber atau sumber data (Trivaika, Erga & Senubekti, Mamok Andri, 2022). Wawancara dilakukan dengan para informan yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemulihan citra pariwisata, seperti pihak Dinas Pariwisata, pelaku usaha pariwisata, serta tokoh masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan dan program di lapangan. Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan (Romdona, Siti. et al, 2025) Metode ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pola kerja, sistem koordinasi, serta respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh instansi terkait. Selain itu, dokumentasi juga menjadi sumber data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil dari wawancara dan observasi. Dokumentasi adalah proses pengamatan langsung yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tema yang sedang dibahas oleh peneliti (Prawiyogi, Anggy Giri. et al, 2021).

Prosedur Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki objek penelitian dalam keadaan alami yang dimana, peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data dilakukan dengan cara induktif serta hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada sekadar membuat generalisasi (Abdussamad, Zuchri. 2021). Hal ini memiliki arti bahwa pendekatan kualitatif menekankan pada upaya memahami secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau realitas sosial yang sedang diteliti. Maka dari itu, penelitian kualitatif merupakan metode yang sangat cocok untuk mendapatkan pemahaman mengenai suatu permasalahan yang sedang diteliti.

III. Hasil dan Bahasan

Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peranan penting dalam merancang, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata di Bali. Sebagai pelaksana dalam sektor yang menjadi fondasi ekonomi daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Bali bertanggung jawab atas aspek pengelolaan pariwisata, mulai dari perencanaan jangka panjang, pengembangan destinasi unggulan, peningkatan daya tarik wisata, hingga pelaksanaan promosi pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Peran utama Dinas Pariwisata meliputi pengembangan infrastruktur dan fasilitas di destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan pariwisata, serta penguatan struktur organisasi pariwisata di tingkat daerah. Selain itu, lembaga ini juga sangat memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta industri pariwisata. Hal ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global. Di tengah perubahan global yang terus terjadi seperti pergeseran dalam tren perjalanan, perkembangan teknologi

informasi, serta tantangan akibat krisis lingkungan dan sosial, fungsi Dinas Pariwisata menjadi semakin penting dan rumit. Berbagai faktor, seperti masalah pariwisata berlebihan, bencana alam, pandemi, atau konflik sosial, bisa mengancam reputasi Bali sebagai tujuan wisata internasional. Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata perlu memiliki tingkat responsivitas yang tinggi, kebijakan inovatif, dan kerjasama lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan serta daya saing pariwisata di Bali. Dengan posisi yang strategis dan tanggung jawab yang besar, Dinas Pariwisata Provinsi Bali berkomitmen untuk terus melakukan penyesuaian dan transformasi dalam menghadapi tantangan yang ada.

Pernyataan kontroversi mengenai "Bali Tidak Layak Dikunjungi pada Tahun 2025" telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan situs berita online yang menciptakan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan industri pariwisata di Bali. Masalah ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai masalah yang dianggap mengganggu pengalaman wisatawan dan merusak reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Beberapa penyebab utama meliputi kemacetan lalu lintas yang semakin parah di area wisata utama, manajemen sampah yang belum optimal, serta keluhan dari wisatawan mengenai kurangnya profesionalisme dari beberapa pelaku industri pariwisata dalam memberikan layanan. Situasi ini berdampak langsung pada kinerja pariwisata Bali, yang terlihat dari menurunnya minat wisatawan untuk datang dan meningkatnya jumlah pembatalan perjalanan baik oleh wisatawan lokal maupun internasional. Keadaan ini menjadi tantangan yang perlu ditanggapi dengan cepat dan tepat agar wisata Bali sebagai tujuan wisata utama tidak terus menurun.

Gambar 1. Klarifikasi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali



(Sumber : dispardabaliprov.go.id)

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebelumnya bapak Tjok Bagus pelayan menyatakan bahwa memang ada kemacetan di beberapa titik di Bali, khususnya daerah Bali bagian Selatan seperti Jimbaran, Kuta, Legian, Seminyak, Canggu. Namun, masih banyak daerah Bali yang belum banyak dikunjungi wisatawan, jika hal tersebut disebut sebagai over tourism, menurut bapak Tjok Bagus Pelayan ini tidak benar adanya, hanya saja kurang meratanya kunjungan wisatawan lokal maupun internasional di Bali. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah over tourism di Bali Selatan adalah memberlakukan moratorium pada pembangunan tempat tinggal wisata di area tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol perkembangan infrastruktur pariwisata yang dianggap telah melampaui kapasitas lingkungan dan sosial budaya setempat. Sebagai langkah lanjutan dari kebijakan ini, pemerintah mendorong agar pembangunan sektor pariwisata disebar ke daerah-daerah lain di Bali yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, tetapi belum dieksplorasi secara maksimal. Daerah-daerah yang dimaksud meliputi Bali Utara, seperti Kabupaten Buleleng, Bali Timur yang mencakup Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Karangasem, serta Bali Barat yang terdiri dari Kabupaten Tabanan dan Jembrana.

Gambar 2. Sosialisasi PERDA No 5 Tahun 2020

(Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali)



Melalui wawancara dengan ibu Ni Wayan Esti Ekarini, S.S., M.Hum. dari bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyampaikan bahwa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali dimulai dari peningkatan kualitas destinasi pariwisata. Peningkatan ini mencakup pengembangan wilayah destinasi wisata serta produk-produk pariwisata yang disesuaikan dengan standar penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya Bali. Diharapkan, seluruh pengelola daya tarik wisata di Bali dapat menerapkan standar tersebut secara konsisten. Apabila standar yang diterapkan semakin baik, maka tingkat kepuasan wisatawan akan meningkat, sehingga mendorong mereka untuk terus berkunjung ke Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan infrastruktur, khususnya dalam hal peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata agar dapat dicapai dengan lebih cepat dan efisien. Salah satu isu krusial yang tengah menjadi perhatian serius adalah persoalan kemacetan.

Gambar 3. Webinar Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber



Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali tengah fokus menangani tiga isu mendesak, yaitu penanganan sampah, kemacetan lalu lintas, dan perilaku wisatawan asing di Bali. Untuk permasalahan kemacetan, solusi tengah dikaji dan dikoordinasikan melalui Dinas Perhubungan. Sementara itu, permasalahan sampah berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, namun Dinas Pariwisata tetap memiliki tanggung jawab dalam mendorong sektor perhotelan, restoran, dan industri pariwisata untuk menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting demi menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman di Bali. Perlu ditekankan bahwa kebersihan dan kenyamanan Bali sebagai destinasi bebas sampah bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh pelaku dan pengelola industri pariwisata.

Dalam melestarikan budaya Bali, peran desa adat sangatlah krusial dan dapat dikatakan sebagai benteng terakhir yang menjaga eksistensi agama, budaya, dan tradisi lokal. Desa adat memiliki fungsi dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. Salah satu contoh nyata adalah keberadaan pekalang yang tidak hanya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mendukung keberlangsungan pelaksanaan upacara dan kegiatan budaya di tingkat lokal. Sebagai bentuk implementasi prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan keberpihakan terhadap komunitas lokal, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan dukungan keuangan khusus kepada sekitar 1.500 desa adat yang tersebar di seluruh Bali. Setiap desa adat menerima dana sebesar kurang lebih 300 juta rupiah per tahun, yang digunakan untuk mendukung kegiatan tradisi dan keagamaan. Kebijakan ini mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam memperkuat budaya lokal sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan yang di mana pelestarian budaya menjadi salah satu pilar utamanya. Selain itu, bidang destinasi wisata juga menerapkan pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang menyasar desa wisata. Kegiatan pelatihan tersebut mencakup berbagai aspek seperti pembuatan konten promosi melalui platform digital, pengembangan storytelling budaya hingga pelatihan menjadi local guide yang berkualitas. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif dalam pengelolaan destinasi. Selain itu, bidang pemasaran juga memiliki peran penting dalam melakukan promosi wisata, yang dimana dapat mengembalikan kepercayaan wisatawan atas isu yang sudah beredar dimasyarakat. Hal ini harus dikonfirmasi melalui media sosial maupun media promosi lainnya bahwa tidak semua wilayah Bali terjadi over tourism tetapi hanya di beberapa titik dan Pemerintah Provinsi Bali akan terus merealisasikan kebijakan untuk mengatasi over tourism tersebut.

Dengan adanya Surat Edaran Nomor 7 tahun 2025 tentang Tata Cara Baru Bagi Wisatawan Asing di Bali, Ibu Ni Wayan Esti Ekarini, S.S., M.Hum. menyatakan bahwa jika hanya surat edaran (SE), pemerintah belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan penegakan hukum secara langsung, karena landasan hukum yang mengikat harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Proses pembentukan Perda tentu memerlukan waktu yang lebih panjang, karena harus melalui mekanisme legislatif dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, penerbitan surat merupakan langkah awal atau bentuk regulasi sementara yang bersifat imbauan sebelum ditetapkan peraturan daerah yang lebih mengikat. Setelah Perda disahkan, barulah tindakan hukum dan pemberlakuan sanksi dapat dilaksanakan secara efektif. Perlu ditegaskan juga bahwa pelaksanaan sanksi tersebut bukan menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, melainkan merupakan tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku aparat penegak Perda di lingkungan pemerintahan daerah.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali menghadapi tantangan dalam aspek kebudayaan yaitu derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan nilai, pola pikir, serta gaya hidup masyarakat secara signifikan. Masuknya pengaruh global ini, jika tidak diimbangi dengan penguatan jati diri budaya lokal. Salah satu dampak nyata dari fenomena ini adalah terjadinya alih fungsi lahan secara luas. Ketika masyarakat Bali mulai menjual tanahnya kepada investor atau pihak luar, bukan hanya terjadi pergeseran kepemilikan aset, namun juga mengarah pada penghilangan identitas budaya yang melekat pada ruang-ruang tersebut. Tanah yang sebelumnya merupakan bagian dari warisan budaya, spiritualitas, dan kehidupan sosial masyarakat lokal, berubah menjadi kawasan komersial yang terkadang tidak lagi merefleksikan nilai-nilai kultural Bali. Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga mengalami tekanan tersendiri. Banyak lapangan pekerjaan yang seharusnya dapat diisi oleh warga lokal, justru mulai diambil alih oleh tenaga kerja asing. Contoh yang paling nyata adalah profesi seperti pemandu wisata (tour guide) atau pemandu yoga yang kini banyak dijalankan oleh warga negara asing. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah belum meratanya kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, terutama dalam hal penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, yang menjadi kunci dalam dunia pariwisata internasional.

Dalam menilai keberhasilan suatu usaha atau program, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata, diperlukan pendekatan berbasis verifikasi langsung di lapangan. Penilaian tidak dapat hanya

dilakukan melalui laporan atau pernyataan semata, karena terdapat kemungkinan bahwa implementasi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah dilaporkan. Oleh karena itu, observasi langsung menjadi langkah untuk memperoleh gambaran nyata terhadap pelaksanaan program atau standar yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bali secara aktif melakukan kunjungan lapangan (field assessment) yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan akademisi, perwakilan asosiasi pariwisata, serta Dinas Pariwisata setempat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk melakukan verifikasi, tetapi juga menjadi momentum untuk melaksanakan sosialisasi mengenai standar penyelenggaraan pariwisata yang telah disosialisasikan.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kami juga menyiapkan daftar periksa (checklist) yang dilengkapi dengan indikator dan rentang penilaian tertentu. Instrumen ini dirancang untuk mengukur sejauh mana standar tersebut diterapkan secara nyata oleh pengelola daya tarik wisata. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi, pemantauan (monitoring), dan pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa standar yang telah disosialisasikan benar-benar diimplementasikan secara konsisten. Dengan adanya proses evaluasi yang berkelanjutan ini, diharapkan terciptanya perbaikan dalam pengelolaan pariwisata, baik dari segi kualitas layanan, pelestarian budaya lokal, maupun perlindungan terhadap lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yaitu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan inklusif, serta memperkuat posisi masyarakat lokal sebagai bagian integral dari pembangunan sektor pariwisata. Melalui program ini, Bali tidak hanya menjaga kualitas destinasi pariwisatanya, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan pariwisata berlangsung secara adil, merata, dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan

Implementasi konsep pariwisata berkelanjutan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah langkah penting untuk memperbaiki citra pariwisata Bali setelah adanya oleh isu negatif "Bali Tidak Layak Dikunjungi Tahun 2025". Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk pemulihan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi pariwisata yang lebih kokoh, menyeluruh, dan berkelanjutan. Usaha ini merupakan penguatan identitas budaya Bali sebagai daya tarik utama pariwisata, melestarikan lingkungan alam, serta memberdayakan komunitas lokal agar mereka dapat berperan aktif dan mandiri dalam pengelolaan destinasi wisata di wilayah mereka sendiri. Dinas Pariwisata tidak hanya berkonsentrasi pada promosi masif melalui berbagai platform digital dan media tradisional untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan domestik dan internasional, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pentingnya pengelolaan pariwisata yang baik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan berbagai penyelenggara sangat penting untuk mewujudkan pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari beragam inisiatif seperti perbaikan infrastruktur dan fasilitas destinasi wisata, penerapan standar perilaku bagi pengunjung, serta penguatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti desa adat, pelaku industri pariwisata, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas setempat.

Dengan menekankan prinsip sustainable tourism, Pemerintah Provinsi Bali berusaha membangun suatu sistem pariwisata yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan, tetapi juga menjadikan industri ini sebagai sarana penting dalam menjaga budaya lokal serta melindungi lingkungan alam yang menjadi ciri khas Bali. Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan sebagai dasar utama, di mana aktivitas pariwisata harus mampu memberikan keuntungan jangka panjang, tidak hanya bagi pengunjung dan pelaku bisnis, tetapi juga untuk generasi yang akan datang dan ekosistem setempat secara keseluruhan. Selain itu, good governance menjadi konsep internal dalam dinas itu sendiri dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menerapkan program-program untuk merealisasikan konsep sustainable tourism. Tujuan utama dari penerapan konsep ini adalah untuk menghapus stigma dan pandangan negatif yang muncul akibat isu-isu yang beredar di masyarakat, sekaligus membangun kembali kepercayaan dunia terhadap Bali sebagai tujuan wisata.

Daftar Pustaka

- Anjeli, Avifa. (2020). Upaya Indonesia Dalam Mengembangkan Sustainable Tourism Berskala Internasional Di Natuna Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 7, Edisi II.*
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. E-book, ISBN 978-623-9753-3-6.
- Disparda Baliprov. (2024). *Adanya berita "Bali Tak Layak Dikunjungi 2025" , Begini Penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.* disparda. baliprov.go.id (Diakses pada 17 Mei 2025)
- Fodor's Travel. (2024). *Fifteen Destinastions To Reconsider in 2025.* Fodors.com (Diakses pada 15 Mei 2025)
- Lintasbali. (2025). *Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2025, Wisatawan Asing Wajib Mentaati Hal Ini.* Lintasbali.com (Diakses pada 27 Mei 2025)
- Nurhidayat, Ipan. (2023). Prinsip - Prinsip Good Governance Di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya, Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government, Volume 1 Nomor 1.*
- Prawiyogi, Anggy Giri,dkk. (2021). Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. *Universitas Buana Perjuangan, Indonesia. Jurnal Basicedu Volume 5, Nomor 1.*
- Permatasari, Indah. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Di Bali. *Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa. Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, E-ISSN 2621-3737.* Ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kerthawicaksana.
- Romdona, Siti,dkk. (2024). Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara dan Kuisisioner. Universitas Pelita Bangsa, Jawa Barat, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol.3, No 1, pp. 39-47.*
- Trivaika, Erga. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer HASS. *Jurnal Nuansa Informatika, Volume 16 Nomor 1.*
- Wirawan, Putu Eka. (2021). *Pengantar Pariwisata. E-book Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.* ISBN : 978-623-97061-0-4.
- Widiati, Ida Ayu Putu & Permatasari, Indah. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, E-ISSN 2621-3737 .* Ejournal.warmadewa.ac.id